

Implementasi Satgas Keamanan Desa (SKD) dalam Kamtibmas di Desa Buwek Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang

Fais Wahyudi¹, Itok Wicaksono²

¹ Universitas Muhammadiyah Jember; faizwahyudi79@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Jember; itokwicaksono@unmuhiember.ac.id

Abstrak: Tingkat keamanan di kabupaten Lumajang sangat rendah. Hal tersebut membuat para pemerintah membuat inovasi program. Yang nantinya bisa mengatasi permasalahan keamanan di kabupaten lumajang. Fokus dari penelitian ini adalah implemementasi program SKD dengan menggunakan pendekatan Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini membahas mengenai implementasi Satuan Tugas Keamanan Desa (SKD) dalam menjalankan fungsi Kamtibmas di Desa Buwek, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, yang mengacu pada tingkat keamanan yang cukup rawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana SKD berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tingkat desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SKD dalam mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori Edward III dalam implementasi program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota SKD, masyarakat, dan pihak terkait, serta melalui analisis dokumen terkait kegiatan SKD dan laporan Kamtibmas di desa tersebut. Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai peran SKD dalam menjaga ketertiban dan keamanan, strategi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas, serta tantangan yang dihadapi. Penelitian ini juga mengidentifikasi upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam mensosialisasikan SKD kepada masyarakat serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga Kamtibmas di Desa Buwek Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas implementasi SKD dan mengoptimalkan peran SKD dalam menciptakan lingkungan desa yang aman dan tertib.

Keywords: BUMDes, Strategi, Pengembangan

DOI: <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.126>

*Correspondensi: Nama Lengkap

Email: email@e-mail.com

Received: 07-11-2023

Accepted: 18-12-2023

Published: 30-01-2024



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: The level of security in Lumajang district is very low. This makes governments create innovative programs. Which will later be able to overcome security problems in Lumajang Regency. The focus of this research is the implementation of the SKD program using the Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure approach. This research discusses the implementation of the Village Security Task Force (SKD) in carrying out the Public Order and Security function in Buwek Village, Randuagung District, Lumajang Regency, which refers to a fairly vulnerable level of security. The aim of this research is to examine how SKD plays a role in maintaining order and security at the village level and identify factors that influence the success of SKD implementation in achieving these goals. This research uses Edward III's theory in program implementation. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data was collected through interviews with SKD members, the community and related parties, as well as through analysis of documents related to SKD activities and Kamtibmas reports in the

village. The results of this research provide an overview of the role of SKD in maintaining order and security, the strategies used in carrying out tasks, and the challenges faced. This research also identifies the efforts that have been made by the village government to socialize SKD to the community and encourage active community participation in maintaining security and social order in Buwek Village, Randuagung District, Lumajang Regency. It is hoped that the findings from this research can provide input for related parties

in increasing the effectiveness of SKD implementation and optimizing the role of SKD in creating a safe and orderly village environment.

Keywords: BUMDes, Strategy, Development

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945). Prinsip negara hukum ini menegaskan bahwa hukum memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, mengatur interaksi manusia, dan menjaga ketertiban (Amallia, 2020). Hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku, alat kontrol sosial, dan landasan utama dalam semua aspek kehidupan (Hermarani & Kuswardani, 2022). Dalam konteks negara hukum, hukum tidak hanya mempertahankan norma yang ada tetapi juga bisa mengubah dinamika masyarakat. Hukum berperan dalam mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan individu dalam masyarakat, sehingga kepentingan yang berbeda bisa berjalan sejalan. Pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) diakui sebagai kebutuhan dasar (Tachjan, 2006). Keamanan menciptakan harmoni dalam masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Ancaman terhadap Kamtibmas bisa bersifat internal (konflik antar kelompok, perbedaan suku, agama) atau eksternal (kejahatan, terorisme). Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam proses ini, terutama dalam era otonomi daerah (Wibowo & Triputro, 2022). Partisipasi masyarakat penting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban yang mendukung. Pada tingkat terendah pemerintahan, kepala desa memiliki peran penting dalam menjaga Kamtibmas. Mereka bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan di desa, membina kemasyarakatan, dan menjaga ketentraman masyarakat (Visvizi, 2020). Partisipasi masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat juga diperlukan dalam mendukung upaya menjaga Kamtibmas (Bogdan & Biklen, 1982). Tindak kriminalitas dan gangguan Kamtibmas menjadi perhatian serius di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di desa-desa. Salah satu upaya dalam mengatasi masalah ini adalah pendirian Satgas Keamanan Desa (SKD). SKD adalah kelompok sukarelawan yang bertujuan meningkatkan keamanan dan ketertiban di desa. Program ini mendapatkan dukungan dari pemerintah dan melibatkan masyarakat dalam menjaga Kamtibmas (Tian, 2020). Di desa Buwek, Kabupaten Lumajang, terdapat program SKD yang berhasil mengurangi tindak kriminalitas dan membantu menjaga keamanan desa. Anggota SKD bekerja secara sukarela dengan tujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Program ini menjadi contoh bagaimana kerjasama antara aparat dan masyarakat dapat memperkuat upaya menjaga Kamtibmas (Hidayat, 2021). Namun, implementasi SKD masih memerlukan peningkatan di beberapa desa. Keberhasilan SKD tergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan dukungan pemerintah (Johnston, 2019). Dalam kondisi perkembangan sosial dan ekonomi yang terus berubah, upaya menjaga Kamtibmas harus terus disesuaikan agar masyarakat bisa hidup dalam keadaan aman dan tenteram.

Metode

Desain Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. (Sugiyono, 2014a) deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Populasi, Sampel, Sampling

Populasi dalam penelitian ini melibatkan Kapolsek, Kepala Desa Duwek, Anggota Satgas Keamanan Desa, dan Babinkamtibmas, pelaksana implementasi satgas program SKD (Satgas Keamanan Desa). Penentuan sampel dalam penelitian ini yakni teknik Purposive Sampling yang mana dalam teknik ini menggunakan pertimbangan tertentu saat penentuan sampel. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah menentukan orang yang dianggap lebih tahu mengenai apa yang kita harapkan. Seseorang tersebut dapat berkedudukan sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk mengulas situasi atau objek yang diteliti (Iskandar & dalam kutipan R., 2010)

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Buwek, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang. Peneliti melakukan penelitian di Desa Buwek karena merupakan salah satu desa yang melaksanakan program SKD dengan permasalahan yang terjadi yaitu keamanan yang masih rawan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2023.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian meliputi: pertama, observasi dengan jenis observasi partisipan dengan melibatkan diri secara langsung untuk melakukan pengamatan di lokasi penelitian dan guna memperoleh data informasi yang akurat, serta mengetahui situasi yang sebenarnya terjadi. Kedua, wawancara secara terbuka (tidak terstruktur) dan tertulis agar informan dapat secara bebas menyampaikan pendapatnya, yang melalui komunikasi secara tanya jawab langsung dan mendalam terkait dengan permasalahan yang diteliti. Ketiga, dokumentasi untuk menghasilkan data yang didapatkan dari catatan penting berupa tulisan, gambar, hasil rekaman, catatan harian saat proses wawancara (Sugiyono, 2014a).

Instrumen

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni pedoman wawancara dengan model wawancara tertulis dan terbuka.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menerapkan pendekatan implementasi yang mengadopsi perspektif dari atas ke bawah, yang dikembangkan oleh Edward III seperti yang dijelaskan oleh Elih Yuliah (III, 1980). Model implementasi kebijakan ini dikenal dengan istilah "direct and indirect impact on implementation". Dalam model ini, terdapat empat faktor yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. (Sugiyono, 2014b)

Keempat faktor tersebut memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

A. Komunikasi

Kesuksesan dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada efektivitas komunikasi. Implementasi yang berhasil terjadi jika para pengambil keputusan memahami dengan jelas apa yang akan mereka lakukan. Pemahaman ini dapat terjadi apabila komunikasi berlangsung lancar, memungkinkan setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasinya untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang. Selain itu, penyampaian kebijakan tersebut haruslah tepat, akurat, dan konsisten (Zhang, 2018).

Agar para pembuat keputusan dan pelaksana kebijakan tetap konsisten, komunikasi menjadi krusial. Ada tiga kriteria untuk mengevaluasi keberhasilan komunikasi. Pertama, transmisi, di mana komunikasi yang baik juga mengarah pada implementasi yang baik. Ketika komunikasi dilakukan melalui berbagai tingkat birokrasi, seringkali terjadi pemahaman yang buruk atau miskomunikasi (Saediman, 2019). Kedua, agar para pelaksana kebijakan memiliki komunikasi yang jelas dan terang. Namun, ketidakjelasan dalam komunikasi suatu kebijakan tidak selalu menghalangi pelaksanaannya, tetapi para pelaksana tindakan harus memiliki informasi yang akurat untuk memastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan isi kebijakan.

Ketiga, penerapan perintah komunikasi harus konsisten. Pada awalnya, hal ini sangat penting karena karyawan di tempat kerja dapat bingung jika perintah-perintah tersebut sering berubah. Tiga faktor yang mempengaruhi proses ini adalah sebagai berikut:

1. Transmisi

Kesalahan dalam penyaluran komunikasi atau miskomunikasi sering terjadi, oleh karena itu, diperlukan penyaluran komunikasi yang efektif agar menghasilkan implementasi yang berhasil pula.

2. Kejelasan

Para pelaksana kebijakan harus menjaga agar komunikasi yang mereka terima jelas, tidak ambigu, atau membingungkan, karena jika komunikasi tersebut kurang jelas, pesan dari kebijakan yang hendak diterapkan dapat menghambat proses implementasi. Terkadang, pada tingkat tertentu, kekurangan kejelasan dalam pesan kebijakan tidak selalu menghambat implementasi, karena para pelaksana kebijakan memerlukan fleksibilitas dalam menerapkan kebijakan tersebut. Namun, pada

tingkat lain, ketidakjelasan dalam komunikasi dapat mengakibatkan penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Konsistensi

Pentingnya menjaga konsistensi dan kejelasan dalam pelaksanaan komunikasi tidak boleh diabaikan. Hal ini disebabkan karena seringkali para pelaksana kebijakan menghadapi kebingungan karena adanya perubahan-perubahan dalam instruksi yang diberikan.

B. Sumber Daya

Efektivitas sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia. Terdapat berbagai bagian sumber daya yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan. Tenaga kerja, atau sumber daya manusia, merupakan komponen utama dari sumber daya tersebut (Tobin, 2019). Faktor-faktor yang sering kali berkontribusi terhadap kegagalan dalam implementasi kebijakan adalah kurangnya inisiatif, kurangnya motivasi, atau kurangnya keterampilan dari karyawan yang terlibat. Meningkatkan jumlah pelaksana tidak cukup; diperlukan juga karyawan-karyawan dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan (Sugiyono, 2014b).

Kedua, implementasi kebijakan tergantung pada informasi. Informasi dibagi menjadi dua kategori: Informasi tentang kepatuhan terhadap hukum dan data tentang penerapan hukum.

Ketiga, implementasi kebijakan tergantung pada otoritas. Agar perintah atau tugas dapat dilaksanakan, otoritas umumnya harus bersifat formal (Afentina, 2021). Untuk melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, para penanggung jawab memiliki otoritas dan legitimasi untuk melakukannya. Ketika tidak ada otoritas yang jelas, masyarakat merasa bahwa pelaksana kebijakan kekurangan legitimasi, yang dapat menghambat proses implementasi kebijakan.

Keempat, lokasi sangat penting (Rusliyadi, 2019). Pelaksana dapat mengandalkan tenaga kerja yang sesuai, pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab, dan kewenangan untuk melaksanakannya. Namun, implementasi kebijakan pemerintah tidak akan efektif tanpa adanya sumber daya pendukung yang tepat. Ketika berbicara tentang pelaksanaan kebijakan, beberapa pihak harus dipertimbangkan:

1. Staf

Pada pelaksanaan kebijakan, peran staf merupakan faktor terpenting. Kualitas staf yang tidak memadai, kurang memadai, atau tidak memiliki kompetensi dalam bidangnya menjadi hal yang kritis dalam memastikan suksesnya proses implementasi kebijakan. Keberhasilan proses ini sangat tergantung pada staf yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang sesuai (N. Li, 2022). Penambahan jumlah staf dan pelaksana kebijakan saja tidak akan cukup, jika mereka tidak memiliki kompetensi yang diperlukan.

2. Wewenang

Sebagai bagian dari otoritas atau legitimasi mereka, para pelaksana kebijakan harus memiliki otoritas yang jelas untuk melaksanakannya. Agar perintah-perintah

dilaksanakan dengan benar, karakteristik otoritas seharusnya bersifat formal. Tanpa adanya wewenang yang jelas, masyarakat tidak akan menganggap kuasa para pelaksana kebijakan sebagai sesuatu yang sah (Hanley, 2021). Akibatnya, implementasi kebijakan dapat mengalami kegagalan. Tetapi ketika otoritas formal diterapkan dalam konteks tertentu, masalah umum dapat muncul saat mengevaluasi efektivitasnya. Namun, efektivitas otoritas dapat berkurang jika para administrator menggunakannya untuk keuntungan suatu kelompok atau bahkan untuk diri sendiri (C. Li, 2022).

3. Fasilitas

Fasilitas memegang peranan utama dalam menentukan suksesnya pelaksanaan suatu rencana, dan hal ini tidak hanya tergantung pada keberadaan staf yang memadai, pengetahuan staf tentang tugas yang harus dijalankan, dan kemampuan manajemen yang dimiliki untuk melaksanakan tugas tersebut (Utomo, 2022). Tidak hanya faktor-faktor tersebut yang harus dipertimbangkan oleh pelaksana, namun juga ketersediaan fasilitas pendukung, yaitu sarana dan prasarana, juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesuksesan implementasi.

C. Disposisi

Disposisi merupakan salah satu faktor kunci dalam menilai keberhasilan implementasi suatu kebijakan (Idamokoro, 2022). Bagi para pelaksana kebijakan, memiliki keinginan untuk menjalankan kebijakan secara efektif dan efisien adalah kunci, dan mereka harus memahami langkah-langkah yang harus diambil serta memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mencegah praktik-praktik yang tidak adil (Pane, 2021b). Salah satu komponen penting dalam faktor disposisi adalah dalam proses pengangkatan birokrat. Dalam hal ini, disebutkan bahwa sikap atau disposisi yang tidak positif dari pelaksana kebijakan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, dalam pengangkatan birokrat atau personel, sangat penting memilih individu yang memiliki komitmen tinggi terhadap pekerjaan mereka (Sugiyono, 2014b).

D. Struktur Birokrasi

Edward III menyatakan bahwa, meskipun sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersedia dan para pelaksananya bersedia untuk melakukannya serta memiliki keinginan untuk melakukannya, kebijakan tersebut mungkin tidak berhasil karena kekurangan dalam struktur dua-kepala (Pane, 2021a). Kebijakan yang kompleks memerlukan kerjasama dari banyak pihak, tetapi jika struktur birokrasi tidak mendukung kebijakan tersebut, hasilnya sumber daya yang digunakan akan kurang efektif dan orang-orang akan kurang termotivasi, yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut (Nigussie, 2021). Sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi harus berkoordinasi untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan secara politis. Efektivitas struktur birokrasi dapat ditingkatkan dalam dua hal: penciptaan SOP yang lebih dapat beradaptasi dan implementasi fragmentasi di bawah pengawasan organisasi yang kompeten dan mampu (Sugiyono, 2014b).

Struktur organisasi pemerintahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Jika tersedia sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan, serta para pelaksana yang memahami tugas dan memiliki motivasi untuk menerapkan kebijakan tersebut, maka kemungkinan besar kebijakan tersebut akan berhasil (Jiang, 2022). Namun, jika struktur birokrasi tidak mendukung, maka kebijakan mungkin akan menghadapi kesulitan bahkan tidak dapat terealisasi karena adanya kelemahan dalam struktur tersebut. Apabila kebijakan memerlukan kerjasama dari banyak pihak, maka keberhasilan sumber daya yang dimiliki akan terganggu jika struktur birokrasi tidak kondusif ((Babu), 2021). Hal ini bisa menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Keputusan kebijakan yang telah diambil secara politis harus mendapat dukungan dari birokrasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, dengan cara melakukan koordinasi yang efektif.

Dalam implementasi kebijakan publik, terdapat empat indikator penting yang mempengaruhi kesuksesannya, seperti dijelaskan dalam teori. Teori ini mengacu pada model implementasi kebijakan yang memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap pelaksanaannya. Empat faktor krusial dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan ini termasuk komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Dunn, 2003).

1. Komunikasi dianggap sebagai langkah awal dalam menyelesaikan masalah terkait kamtibmas. Berdasarkan wawancara dengan informan, bentuk komunikasi yang efektif diimplementasikan dengan inisiatif diri sendiri, termasuk komunikasi langsung antar-anggota serta penggunaan teknologi seperti grup WhatsApp.
2. Sumber daya, seperti jumlah anggota dan penempatan mereka dalam berbagai wilayah desa, menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam kasus ini, jumlah anggota yang cukup banyak dan tersebar di berbagai dusun di desa Buwek memungkinkan penanganan masalah kamtibmas dengan cepat.
3. Disposisi mengacu pada pemahaman dan kesiapan anggota dalam menangani masalah (Ilham, 2022). Pembinaan dan pelatihan yang diberikan oleh pihak eksternal, seperti Babinsa dan Kapolsek, memberikan dampak positif terhadap kemampuan anggota dalam menangani permasalahan. Pertemuan rutin dan pengarahan yang dilakukan oleh kepala desa juga berkontribusi terhadap pemahaman dan kesadaran anggota terhadap tugas pokok mereka.
4. Struktur keanggotaan dalam Satgas Keamanan Desa (SKD) harus jelas dan terdefinisi. Terdapat kesepakatan mengenai pentingnya struktur yang terorganisir dan terdefinisi, yang diatur dalam surat keputusan Bupati. Pembinaan dan dukungan datang dari pihak eksternal, seperti Babinsa dan Kapolsek, serta melibatkan kepala desa dalam peran pembina.

Dalam implementasi kebijakan kamtibmas di Desa Buwek, faktor-faktor seperti komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, pemahaman dan kesiapan anggota, serta struktur keanggotaan yang terorganisir, semuanya berperan dalam mencapai kesuksesan implementasi kebijakan keamanan desa (Fitriani, 2022).

Simpulan

Implementasi Satuan Tugas Keamanan Desa (SKD) dalam kerangka Kamtibmas, berdasarkan teori Edward III yang mengidentifikasi 4 indikator kunci (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi), adalah bahwa pendekatan ini telah membawa dampak positif dalam mencapai keberhasilan dalam menjaga ketertiban dan keamanan desa. Melalui komunikasi yang baik antara elemen internal dan eksternal, seperti babinsa, kapolsek, kepala desa, dan anggota SKD, permasalahan terkait ketertiban dan keamanan masyarakat dapat diselesaikan dengan efektif. Sumber daya yang memadai, dengan 47 anggota SKD terbagi di tiga dusun di desa Buwek, memungkinkan sinergi dan respons cepat terhadap situasi. Disposisi anggota SKD yang dipengaruhi oleh pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh kapolsr dan kapolsek, membantu setiap anggota untuk memahami tugas mereka dalam menghadapi masalah yang mengancam ketertiban dan keamanan. Struktur terorganisir dalam SKD, dengan kepala satgas di tingkat desa dan kepala anggota di setiap dusun, memungkinkan koordinasi yang efisien serta penyelesaian masalah yang cepat di tingkat lokal. Pentingnya peran SKD dirasakan oleh masyarakat, karena selain menjaga keamanan desa, mereka juga menjadi sumber bantuan dalam situasi-situasi di luar ranah keamanan. Secara keseluruhan, pendekatan ini telah membuktikan efektivitasnya dalam meningkatkan Kamtibmas di desa Buwek, dengan penerapan komunikasi yang baik, optimalisasi sumber daya, disposisi anggota yang tepat, dan struktur birokrasi yang terorganisir.

Daftar Pustaka

- Afentina. (2021). The Potential of Agroforestry in Supporting Food Security for Peatland Community – A Case Study in the Kalampangan Village, Central Kalimantan. *Journal of Ecological Engineering*, 22(8), 123–130. <https://doi.org/10.12911/22998993/140260>
- Amallia, N. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Sistem Keamanan Lingkungan Untuk Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. *Jisip*, 2(1), 1–9.
- (Babu), K. E. K. (2021). Cyber Security in the Global Village and Challenges for Bangladesh: An Overview on Legal Context. *Advanced Sciences and Technologies for Security Applications*, 253–267. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68534-8_16
- Bogdan, R. C., & Biklen, K. S. (1982). *Qualitative Research For Education; An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Fitriani. (2022). The food security policy model in the village government. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1107(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1107/1/012099>
- Hanley, A. (2021). Community-level impacts of climate-smart agriculture interventions on food security and dietary diversity in climate-SMART VILLAGES in myanmar. *Climate*, 9(11). <https://doi.org/10.3390/cli9110166>

- Hermarani, O. S., & Kuswardani, K. (2022). Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 18, 212–222.
- Hidayat, E. (2021). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 2(1), 126–136.
- Idamokoro, E. M. (2022). Village chicken production and food security: a two-decade bibliometric analysis of global research trends. *Agriculture and Food Security*, 11(1). <https://doi.org/10.1186/s40066-022-00379-0>
- III, G. C. E. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Ilham, A. (2022). The smart village program challenges in supporting national food security through the implementation of agriculture 4.0. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1107(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1107/1/012097>
- Iskandar, M., & dalam kutipan R., H. (2010). *ANALISIS PENELITIAN KUALITATIF MODEL MILES dan HUBERMAN (Sebuah rangkuman dari buku Analisis Data Kualitatif, Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman) Terjemahan Tjetjep Rohindi, UI-Press 1992*.
- Jiang, H. (2022). When the natural pendulum swings between drought and flood, a bifunctional natural drainage system safeguards a mountain village's water security incessantly for centuries. *Socio-Ecological Practice Research*, 4(2), 117–129. <https://doi.org/10.1007/s42532-022-00109-7>
- Johnston, A. C. (2019). It takes a village: Understanding the collective security efficacy of employee groups. *Journal of the Association for Information Systems*, 20(3), 186–212. <https://doi.org/10.17705/1jais.00533>
- Li, C. (2022). The Effectiveness Assessment of Agricultural Subsidy Policies on Food Security: Evidence from China's Poverty-Stricken Villages. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(21). <https://doi.org/10.3390/ijerph192113797>
- Li, N. (2022). Does the democratization level of village governance affect perceptions of security and integrity of land rights? -An analysis from the perspective of social network abundance. *Journal of Rural Studies*, 94, 305–318. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.06.013>
- Nigussie, H. (2021). Back to the village: Integrating folk media into rural food security communication in Ethiopia. *Re-Imagining Communication in Africa and the Caribbean: Global South Issues in Media, Culture and Technology*, 273–292. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54169-9_15
- Pane, T. C. (2021a). Implementation of rice farming insurance to support food security and the willingness to pay (case study in Cinta Damai Village, Percut Sei Tuan Subdistrict, Deli Serdang District). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 782(2). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/782/2/022045>
- Pane, T. C. (2021b). Supporting food security with rice farming insurance: The farmers' perceptions (case study in Cinta Damai Village, Percut Sei Tuan Subdistrict, Deli

- Serdang District). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 782(2). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/782/2/022044>
- Rusliyadi, M. (2019). Analysis of household food security policy: Case of food security village programme, Indonesia. *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*, 9(1), 19–32. <https://doi.org/10.18488/journal.1005/2019.9.1/1005.1.19.32>
- Saediman, H. (2019). Food security status of households in a cassava-growing village in southeast Sulawesi, Indonesia. *Journal of Agricultural Extension*, 23(1), 199–209. <https://doi.org/10.4314/jae.v23i1.17>
- Sugiyono. (2014a). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014b). *Memahami Penelitian Kualitatif*. In Sugiyono (Ed.), *Bandung: Alfabeta* (Alfabeta). ALFABETA.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI.
- Tian, S. (2020). Ecological security and health risk assessment of soil heavy metals on a village-level scale, based on different land use types. *Environmental Geochemistry and Health*, 42(10), 3393–3413. <https://doi.org/10.1007/s10653-020-00583-6>
- Tobin, D. (2019). Does crop diversity at the village level influence child nutrition security? Evidence from 11 sub-Saharan African countries. *Population and Environment*, 41(2), 74–97. <https://doi.org/10.1007/s11111-019-00327-4>
- Utomo, D. T. (2022). Modeling the Potential of Cereal Crops with a Smart Village-Based GIS Approach to Support Food Security. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 980(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/980/1/012057>
- Visvizi, A. (2020). Sustainable smart cities and smart villages research: Rethinking security, safety, well-being, and happiness. *Sustainability (Switzerland)*, 12(1). <https://doi.org/10.3390/su12010215>
- Wibowo, E., & Triputro, R. W. (2022). Implementasi 3 Pilar Sinergis Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonis. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 3(1), 54–73.
- Zhang, M. (2018). The determinants of informal housing price in Beijing: Village power, informal institutions, and property security. *Cities*, 77, 117–129. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.01.018>